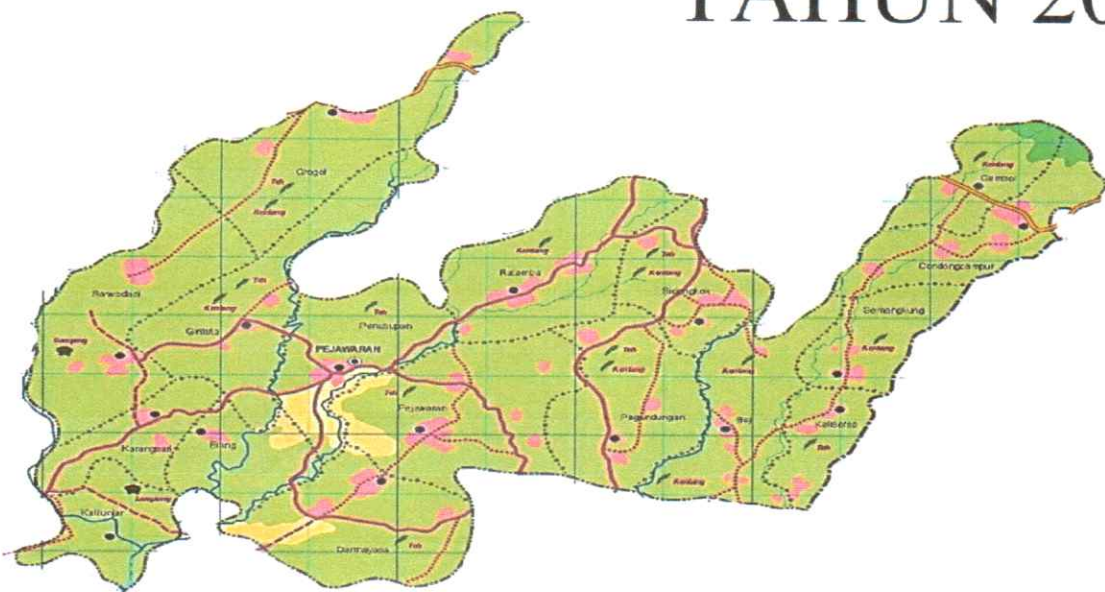


Pemerintah Kabupaten Banjarnegara



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2024



**KECAMATAN PEJAWARAN
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pejawaran Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu. LKjIP ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Kecamatan Pejawaran merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran serta pengelolaan sumber daya kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Pejawaran. Laporan Kinerja Tahun 2024 menggambarkan capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan di awal tahun, beserta analisisnya, permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target.

Pencapaian target tahun 2024 ini merupakan hasil partisipasi dan kerja keras seluruh pegawai Kecamatan Pejawaran. Pencapaian ini akan menjadi modal untuk terus meningkatkan kinerja melalui perbaikan budaya kerja dengan mengusung nilai-nilai integritas dan profesionalisme dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Akhir kata, semoga LKjIP Kecamatan Pejawaran Tahun 2024 ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan memberikan manfaat dalam penyusunan rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Pejawaran, 17 Februari 2025


Kecamatan PEJAWARAN
BANJARNEGARA

SETIYADI, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19810615 200112 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Gambaran Umum 1

 B. Profil Kecamatan Pejawaran 3

 C. Isu Strategis Organisasi 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA 6

 A. Perencanaan Strategis Organisasi Tahun 2023 – 2026 6

 B. Penjanjian Kinerja Tahun 2024 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 9

 A. Capaian Kinerja Organisasi 9

 B. Realisasi Anggaran 36

BAB IV PENUTUP 38

 A. Kesimpulan 38

 B. Strategi Peningkatan Kinerja 38

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah Dusun, RW dan RT pada Kecamatan Pejawaran	1
Tabel 1.2.	Jumlah Penduduk Kecamatan Pejawaran sampai dengan 31 Desember 2024	2
Tabel 3.1.	Skala Penilaian Nilai Perangkat Kinerja	9
Tabel 3.2.	Capaian Indikator Nilai SAKIP.....	11
Tabel 3.3.	Nilai Komponen Nilai SAKIP	10
Tabel 3.4.	Perbandingan Capaian Indikator Nilai SAKIP	12
Tabel 3.5.	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra	12
Tabel 3.6.	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Nilai SAKIP	12
Tabel 3.7.	Analisis atas efisiensi Nilai SAKIP	14
Tabel 3.8	Perhitungan Efektivitas da Efisiensi Nilai SAKIP	19
Tabel 3.9	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Nilai SAKIP .	20
Tabel 3.10.	Capaian Indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	21
Tabel 3.11.	Hasil Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	22
Tabel 3.12.	Perbandingan Capaian Indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	23
Tabel 3.13.	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra	23
Tabel 3.14.	Analisis Pencapaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	23
Tabel 3.15.	Analisis atas efisiensi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ...	24
Tabel 3.16.	Perhitungan Efektivitas da Efisiensi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	33
Tabel 3.17.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	34
Tabel 3.18.	Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2024	36

BAB I
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian Kinerja Instansi pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Kecamatan Pejawaran sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan Kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kecamatan Pejawaran Tahun Anggaran 2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau tingkat capaian kinerja serta kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Banjarnegara dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

1. Kondisi Geografis Dan Demografis Kecamatan

Kecamatan Pejawaran terletak 33 km dari ibukota Kabupaten Banjarnegara, dengan luas 52,24 km², terdiri dari 17 desa, dan berada pada ketinggian 1.151 m dari atas permukaan laut.

Adapun batas-batas Kecamatan Pejawaran adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kecamatan Batur
- Sebelah timur : Kecamatan Watumalang Kab. Wonosobo
- Sebelah selatan : Kecamatan Pagentan
- Sebelah barat : Kecamatan Wanayasa

Perincian jumlah dusun, RW dan RT masing-masing Desa sebagaimana tersebut dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1.
Jumlah Dusun, RW dan RT pada Kecamatan Pejawaran

NO	Desa/ Keluarga	JUMLAH		
		DUSUN	RW	RT
1	Kalilunjar	2	2	10
2	Biting	3	3	11
3	Tlahab	2	2	9
4	Darmayasa	5	8	23
5	Pejawaran	5	6	25

NO	Desa/ Keluarga	JUMLAH		
		DUSUN	RW	RT
6	Pegundungan	3	3	8
7	Beji	3	4	8
8	Semangkung	2	2	9
9	Condongcampur	3	5	17
10	Gembol	2	5	19
11	Sidengok	4	5	20
12	Ratamba	3	3	8
13	Penusupan	5	6	22
14	Giritirta	5	7	17
15	Karangsari	3	3	17
16	Sarwodadi	3	5	11
17	Grogol	3	3	21
	Jumlah	56	74	255

Sumber : Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Pejawaran

Jumlah penduduk Kecamatan Pejawaran kondisi sampai dengan akhir bulan Desember 2024 adalah 47.147 jiwa, yang meliputi laki-laki 24.079 jiwa dan perempuan 23.068 jiwa, sedangkan jumlah Kepala Keluarga (KK) adalah 16.315 dengan perincian perdesa sebagaimana tersebut pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2.
Jumlah Penduduk Kecamatan Pejawaran
sampai dengan 31 Desember 2024

NO	DESA	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kalilunjar	436	660	637	1.297
2	Karangsari	916	1.650	1.500	3.150
3	Sarwodadi	676	992	919	1.911
4	Grogol	1.027	1.725	1699	3.424
5	Giritirta	1.105	1.474	1.403	2.875
6	Biting	573	879	877	1.756
7	Tlahab	478	848	797	1.645
8	Darmayasa	1.461	2.198	2.152	4.350
9	Pejawaran	1.920	2.465	2.290	4.755
10	Penusupan	1.320	2.149	1.974	4.123
11	Ratamba	840	1.335	1.261	2.596
12	Sidengok	1.735	2.046	1.968	4.014
13	Pegundungan	514	985	1.018	2.003
14	Beji	360	580	615	1.195
15	Semangkung	878	897	849	1.748
16	Condongcampur	971	1.641	1.541	3.182
17	Gembol	1.105	1.555	1.468	3.123
	Jumlah	16.315	24.079	23.068	47.147

Sumber :Laporan Perkembangan Penduduk Kecamatan Pejawaran

2. Potensi Unggulan Pada Wilayah Kecamatan Pejawaran

Potensi wilayah Banjarnegara bagian utara secara umum merupakan dataran pegunungan yang berjajar sebagai bagaian dari Deretan Pegunungan Dieng Utara. Dengan kondisi seperti itu maka masyarakat banyak memanfaatkan lahan untuk perkebunan dan pertanian berupa sayur-sayuran, buah-buahan dan perkebunan komoditas seperti kopi, teh dan tanaman lainnya yang cocok di dataran tinggi.

B. PROFIL KECAMATAN PEJAWARAN

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN

Tugas Kecamatan Sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kerja Kecamatan adalah membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Pejawaran mempunyai fungsi yaitu:

- a. Perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- c. Pelaksanaan Kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- d. Pembinaan dan Fasilitasi kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- e. Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum;
- g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. DATA JUMLAH KARYAWAN

Kecamatan Pejawaran memiliki 17 (tujuh belas) orang karyawan, yang terdiri dari 7 (Tujuh) Pejabat Struktural, 6 (Enam) Fungsional Umum; 1 (Satu) PTT dan 2 (Dua) THL dan 1 (Satu) Harian Lepas.

C. ISU STRATEGIS ORGANISASI

Isu strategis merupakan sebuah kondisi / perkembangan / peristiwa / trend / permasalahan yang berkenaan dengan lingkungan organisasi dan berdampak terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan / sasaran dan strategi organisasi. Isu strategis yang ada di Kecamatan Pejawaran adalah “Tuntutan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan”.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan, permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan kepada masyarakat, bagaimana meningkatkan kualitas SDM aparatur serta bagaimana meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan daerah dalam kondisi pendanaan pemerintah yang terbatas.

Permasalahan pelayanan kecamatan kepada masyarakat diindikasikan oleh belum memadainya dan belum dicapainya tingkat kepuasan pengguna jasa, baik sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan manajemen operasional. Permasalahan sinergitas perencanaan pembangunan daerah diindikasikan oleh belum sinkronnya usulan yang diajukan melalui Musrenbang dengan rencana kerja kecamatan maupun rencana kerja dari OPD di tingkat Kabupaten.

Dari hasil catatan dan evaluasi pada penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan, dapat disimpulkan adanya isu-isu strategis Kecamatan Pejawaran adalah sebagai berikut :

1. Perubahan dan perkembangan peraturan bidang pelayanan masyarakat yang harus dipahami dan dilaksanakan secara cepat dan tepat;
2. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat mulai dari proses awal permohonan dokumen sampai dengan terealisasinya penyelesaian dokumen sesuai kebutuhan masyarakat;
3. Era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang menuntut perkembangan sistem pelayanan masyarakat harus mengikuti dan menyesuaikan dengan perubahan;
4. Belum memadainya kompetensi sumber daya aparatur pegawai di Kecamatan Pejawaran;
5. Belum optimalnya akurasi data sebagai data base perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pembangunan.

Adapun beberapa peluang untuk tetepa memberikan pelayanan yang baik di Kecamatan Pejawaran antara lain :

1. Adanya dukungan peraturan yang lebih tinggi mengenai pelaksanaan pelayanan masyarakat
2. Adanya peluang dan kesempatan dalam upaya peningkatan kompetensi sumber daya aparatur pelaksana pelayanan publik
3. Adanya dukungan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara terhadap program dan kegiatan;
4. Adanya dukungan dari dinas instansi terkait dalam upaya membantu pencapaian target program dan kegiatan di Kecamatan Pejawaran.

Mengingat hal-hal tersebut diatas, maka dilakukan reformasi birokrasi pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik melalui pengembangan program yang diarahkan pada peningkatan sinergitas pemerintah dengan kegiatan peningkatan SDM aparatur, sinkronisasi perencanaan pembangunan dan koordinasi antar organisasi perangkat daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI TAHUN 2023 - 2026

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Perencanaan Kinerja ini merupakan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategis yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kerja yang relevan.

Visi dan Misi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Visi yang akan dicapai adalah “***BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN***”.

Misi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Misi Pertama

Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif, dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat.

2. Misi Kedua

Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai.

3. Misi Ketiga

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggungjawab.

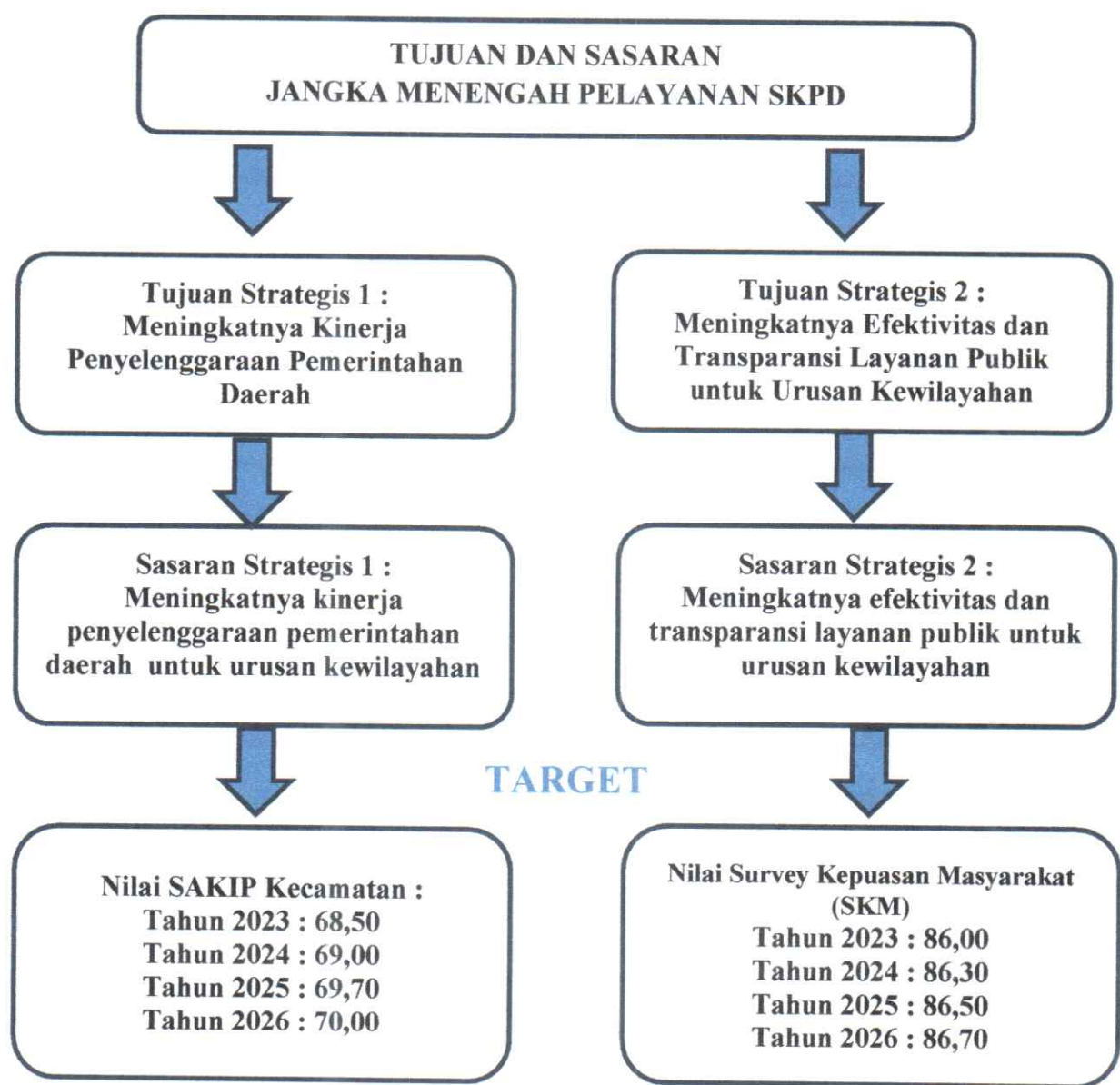
4. Misi Keempat

Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar.

Adapun Misi yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi Kabupaten Banjarnegara sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pejawaran sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dari lima misi tersebut adalah **Misi Ketiga** yaitu:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggungjawab. Dalam hal ini, Kecamatan Pejawaran dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, memperkuat komitmen untuk menciptakan *good and clean government*. Fokus peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui fokus pertama, diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih dekat dan transparan. Sedangkan melalui fokus kedua, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan jika dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan , merupakan salah satu instrumen pembangunan jangka menengah Kecamatan Pejawaran yang sangat penting, karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud. Adapun sasaran dan target kinerja Renstra Kecamatan Pejawaran tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :



B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 sebagaimana telah di reviu dengan Penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 yang mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 serta Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2024.

Penjelasan dari perjanjian kinerja Kecamatan Pejawaran tahun 2024 sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan	Nilai SAKIP Kecamatan	69
2.	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik untuk urusan kewilayahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	86,3

Secara lengkap, Penjanjian Kinerja Tahun 2024 disajikan pada dokumen terlampir.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Salah satu fondasi utama dalam penerapan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penilaian kinerja ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Akan tetapi, kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja mengutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Skala Penilaian Nilai Perangkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91% ≤ 100%	Sangat Baik	
2.	76% ≤ 90%	Tinggi	
3.	66% ≤ 75%	Sedang	
4.	51% ≤ 65%	Rendah	
5.	≤ 50%	Sangat Rendah	

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Pejawaran Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya, membandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya serta membandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis. Adapun capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 :**Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Urusan Kewilayahan**

Sasaran strategis Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan didukung dengan indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP Kecamatan.

Pemerintahan yang akuntabel diwujudkan dengan kesinambungan antara dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Keseluruhan unsur tersebut dilakukan evaluasi secara keseluruhan oleh Inspektorat Kabupaten Banjarnegara sebagai pelaksana dalam mengawal akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penilaian mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran secara efektif, efisien dan ekonomis.

Penilaian dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan instansi pemerintah untuk:

1. Merencanakan target kinerja;
2. Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja;
3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan;
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja;
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

Dari keseluruhan aspek diatas, Kecamatan Pejawaran berdasarkan dokumen Renstra 2023 - 2026 menetapkan sasaran strategis yaitu Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan dengan 1 (Satu) indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP Kecamatan dengan target nilai Kategori B (Baik) dengan nilai pada rentang lebih besar 60 sampai dengan 70.

Capaian indikator kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas indikator kinerja sasaran.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja Nilai SAKIP pada tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi dokumen SAKIP Tahun 2024 Kecamatan Pejawaran menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Nilai SAKIP
Kecamatan Pejawaran Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan	Nilai SAKIP Kecamatan	%	B (69)	B (69,65)	100,94 %

Rata-rata capaian indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Pejawaran tahun 2024 sebesar 100,94 atau Sangat Baik.

Penilaian yang telah dilakukan menetapkan bahwa nilai yang diperoleh Kecamatan Pejawaran sebesar 69,65 dengan rincian hasil evaluasi pada setiap komponen adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Nilai Komponen SAKIP

NO	KOMPONEN	Bobot	Hasil Penilaian
1	Perencanaan Kinerja	30 %	22,20
2	Pengukuran Kinerja	25 %	20,70
3	Pelaporan Kinerja	15 %	10,50
4	Evaluasi Internal	20 %	16,25
Hasil Evaluasi		100 %	69,65

1. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari Sasaran Strategis nomor 1, yaitu Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan dengan Indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Kecamatan Pejawaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Perbandingan capaian kinerja Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dapat diperbandingkan untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Dari table diatas, dapat diketahui bahwa untuk sasaran strategis Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan telah melebihi target. Rata – rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2024 mencapai 100,94 % dikategorikan baik sekali. Capaian ini mengalami kenaikan dari tahun 2023 yang mencapai 99,93%.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja berdasar LHE Inspektorat

Perolehan nilai SAKIP tersebut telah diupayakan dengan berbagai perbaikan pada pelaksanaan kegiatan maupun pendokumentasian dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas kinerja Kecamatan Pejawaran seperti penyempurnaan dokumen Indikator Kinerja Utama, Renstra, Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kerja Tahunan dan dokumen evaluasi capaian kinerja. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang belum optimal dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diantaranya adalah :

1. Target yang ditetapkan atas indikator kinerja “Nilai SAKIP” dalam perencanaan kinerja tidak menantang karena tidak menyajikan nilai (angka)
2. Setiap unit / satuan kerja dan pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
3. Pemanfaatan teknologi informasi (aplikasi) dalam aktivitas pengumpulan data kinerja pengukuran capaian kinerja belum optimal.
4. Penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja belum efisien karena rata-rata capaian kinerja lebih rendah (92,6%) dan realisasi anggaran (99,18%)

Namun demikian sesuai dengan hasil tersebut maka capaian kinerja indikator nilai SAKIP dapat terpenuhi 100,94% yaitu memperoleh predikat **B (69,65)**. Adapun upaya yang dilakukan dalam pencapaian target tersebut antara lain:

1. Pada tahun 2024 ini, sudah ditetapkan target yang jelas atas indikator kinerja “Nilai SAKIP” dalam perencanaan kinerja dan menyajikan nilai (angka) yaitu 69.
2. Kecamatan Pejawaran telah mengadakan rapat atau internalisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian serta komitmen seluruh pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
3. Kecamatan Pejawaran telah menggunakan teknologi informasi berupa linktree untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengumpulan data dan pengukuran kinerja.
5. Untuk tahun 2024, capaian kinerja lebih tinggi (100,94 %) dan realisasi anggaran (98,93%). Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja di Kecamatan Pejawaran sudah efektif.

Analisis atas Efisiensi Indikator Kinerja Nilai SAKIP

Tabel 3.7
Analisis atas Efisiensi
Nilai SAKIP Kecamatan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan	Nilai SAKIP Kecamatan	100,94	98,93	2,01

Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP

Kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran Nilai SAKIP Kecamatan dilakukan melalui 2 Program yaitu Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Didukung oleh 2 kegiatan, yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah. Dengan 8 sub kegiatan, yaitu Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya dan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Menunjang /tidak menunjang
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan	Nilai SAKIP Kecamatan	100,94	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	100	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana	100	Menunjang

2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan, Kecamatan Pejawaran telah menetapkan program yang merupakan bentuk instrument kebijakan yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

Anggaran di tahun 2024 untuk 2 program tersebut sangat tidak mencukupi. Untuk 2 program tersebut hanya memiliki anggaran total Rp. 168.187.500 dengan realisasi Rp. 166.392.400 atau 98,93 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat sisa anggaran yang tidak terpakai sebanyak Rp. 1.795.100.

Untuk program Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa, terutama kegiatan kasi mengalami refocusing anggaran. Dan untuk kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa tidak mempunyai anggaran, tetapi kegiatan harus dilaksanakan dengan anggaran mandiri dari desa.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan didukung oleh pencapaian dengan perincian sebagai berikut:

1. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa memiliki 1 Kegiatan, yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Pada Tahun 2024, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa memiliki total anggaran Rp. 154.687.500 dan realisasi sebesar Rp. 152.892.400 atau sebesar 98,84%. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, penggunaan anggaran Program tersebut dinyatakan efisien.

Adapun Sub kegiatan dari Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, adalah sebagai berikut :

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

Dengan anggaran Rp. 937.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 937.500,- atau 100%. Sub kegiatan ini mempunyai realisasi anggaran yang cukup tinggi karena kegiatan fasilitasi sudah direncanakan dari awal tahun sesuai dengan kegiatan di desa. Didalamnya berisi belanja makan minum rapat untuk kegiatan. Di tahun 2024 tidak bisa menganggarkan lebih karena adanya keterbatasan anggaran yang disediakan. Jadi untuk kegiatan fasilitasi ini memang benar-benar terbatas. Dan tidak terdapat kendala dari pelaksanaan kegiatan ini.

- Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Dengan anggaran Rp. 150.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 148.579.900,- atau 99,05%. Sub kegiatan ini mempunyai realisasi anggaran yang cukup tinggi karena semua kebutuhan selama pelaksanaan Pilkades di 6 Desa sudah direncanakan dan dihitung dengan tepat. Desa yang melaksanakan Pilkades adalah Darmayasa, Sarwodadi, Biting, Ratamba, Semangkung dan Beji . Terdapat sisa anggaran di belanja cetak, terjadi karena adanya selisih harga karena penawaran oleh pejabat pengadaan. Semua belanja di sub kegiatan ini menggunakan e-katalog sehingga terjadi dalam 1 kali transaksi. Yang menjadi kendala adalah pengumuman pelaksanaan kegiatan yang sangat sempit dari kabupaten, sehingga dropping barang belanja sangat berdekatan dengan pelaksanaan pilkades. Sehingga diperlukan tenaga dan waktu yang lebih untuk packing logistik pilkades dan memastikan semua logistik sudah terdistribusi sebelum H-1 Pilkades di 6 desa.

Dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu: : Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran kegiatan dimaksud belum efisien.

- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dengan anggaran 937.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 937.500,- atau 100%. Sub kegiatan ini mempunyai realisasi anggaran yang cukup tinggi karena kegiatan fasilitasi sudah direncanakan dari awal tahun sesuai dengan kegiatan di desa. Didalamnya berisi belanja makan minum rapat untuk kegiatan. Di tahun 2024 tidak bisa menganggarkan lebih karena adanya keterbatasan anggaran yang disediakan. Jadi untuk kegiatan fasilitasi ini memang benar-benar terbatas. Dan tidak terdapat kendala dari pelaksanaan kegiatan ini.

Dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu: Jumlah dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dengan anggaran 937.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 937.500,- atau 100%. Sub kegiatan ini mempunyai realisasi anggaran yang cukup tinggi karena kegiatan fasilitasi sudah direncanakan dari awal tahun sesuai dengan kegiatan di desa. Didalamnya berisi belanja makan minum rapat untuk kegiatan. Di tahun 2024 tidak bisa menganggarkan lebih karena adanya keterbatasan anggaran yang disediakan. Jadi untuk kegiatan fasilitasi ini memang benar-benar terbatas. Dan tidak terdapat kendala dari pelaksanaan kegiatan ini.

Dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : jumlah dokumen Fasilitasi Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

Dengan anggaran 1.875.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000,- atau 80%. Sub kegiatan ini mempunyai realisasi anggaran yang cukup rendah karena ada makan minum rapat yang tidak terealisasi. Terdapatnya selisih jumlah orang dalam satu kegiatan menyebabkan anggaran tidak terserap secara maksimal.

Dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Dokumen Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum memiliki 1 Kegiatan, yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Pada Tahun 2024, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum memiliki total anggaran Rp. 13.500.000 dan realisasi sebesar Rp. 13.500.000 atau sebesar 100 %. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, penggunaan anggaran Program tersebut dinyatakan efisien.

Adapun Sub kegiatan dari Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Dengan anggaran 13.500.000 dan realisasi sebesar Rp. 13.500.000 atau sebesar 100 %. Sub kegiatan ini mempunyai realisasi anggaran yang cukup tinggi karena didalamnya berisi honor narasumber untuk forkompincam dan makan minum rapat. Kegiatan diadakan sebanyak 10 kali. Kendala yang sering dialami adalah terkadang sudah dijadwalkan untuk mengadakan kegiatan, tetapi narasumber tidak lengkap karena ada kegiatan yang lain. Selain itu juga terkadang belum sampai pada jadwal, tetapi sudah ada kegiatan yang harus dibahas dalam forum.

Dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Dokumen Forum Koordinasi Pimpinan dikecamatan.

REALISASI ANGGARAN BELANJA

Adapun rincian realisasi anggaran untuk mencapai indikator sasaran Nilai SAKIP Kecamatan Kecamatan Pejawaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	13.500.000	13.500.000	100,00
<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	13.500.000	13.500.000	100,00
Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di wilayah kecamatan	13.500.000	13.500.000	100,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	154.687.500	152.892.400	98,84
<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	154.687.500	152.892.400	98,84
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	937.500	937.500	100,00
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-	-
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	150.000.000	148.579.900	99,05
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	937.500	937.500	100,00
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	937.500	937.500	100,00
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1.875.000	1.500.000	80,00
JUMLAH	168.187.500	166.392.400	98,32

3. ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI

Efektifitas pelaksanaan anggaran belanja Kecamatan Pejawaran pada tahun 2024 sudah cukup baik. Hal ini karena Realisasi anggaran belanja yang terserap adalah 98,93 %. Walau demikian Kecamatan Pejawaran untuk masa yang akan datang harus berupaya untuk meningkatkan realisasi anggaran belanja tersebut. Dengan demikian, optimalisasi Pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan baik oleh Kecamatan Pejawaran.

Efisiensi pelaksanaan anggaran belanja daerah pada Kecamatan Pejawaran tahun 2024 secara keseluruhan sudah dikelola dengan baik. Maka indikator sasaran Nilai SAKIP Kecamatan dikategorikan “**efisien**”, karena Prosentase Capaian Kinerja melebihi prosentase Capaian Anggaran.

Berikut kami sajikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja tahun 2024 :

Tabel 3.8
Perhitungan Efektivitas dan Efisiensi
Indikator Kinerja Nilai SAKIP Kecamatan

Perhitungan Efektivitas berdasarkan Capaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan	Nilai SAKIP Kecamatan	%	B (69)	B (69,65)	100,94 %	Efektif	Keterangan : ≥100 : Efektif < 100 : Tidak Efektif

Perhitungan Efisiensi berdasarkan Capaian Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (Realisasi Kinerja / Target Kinerja) * 100%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran(%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan	Nilai SAKIP Kecamatan	indeks	B (69)	B (69,65)	100,94 %	168.187.500	166.392.400	98,93 %	Efisien (Capaian Anggaran < Capaian Kinerja)

4. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Efisiensi merupakan ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Pencapaian sasaran Kecamatan Pejawaran didukung dengan aspek sumber daya yang dimiliki serta pemanfaatannya secara optimal.

Dilihat dari aspek efisiensi penggunaan sumber daya maka indikator kinerja ini dikategorikan “**efisien**”, karena capaian indikator lebih besar dari persentase penggunaan sumber daya manusia yaitu 100%. Penggunaan sumber daya yang secara optimal dilakukan oleh seluruh komponen di Kecamatan Pejawaran guna mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sumber daya yang dimaksud disini dapat berupa Sumber daya manusia dan juga sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Pejawaran.

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia
Indikator Kinerja Nilai SAKIP

NO	Indikator Kinerja	Taget			Realisasi			Capaian (%)		
		Indikator	Dana	SDM	Indikator	Dana	SDM	Indikator	Dana	SDM
1	Nilai SAKIP Kecamatan	B (69)	168.187.500	17	B (69,65)	166.392.400	17	100,94	98,93	100

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi merupakan ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Pencapaian sasaran Kecamatan Pejawaran didukung dengan aspek sumber daya yang dimiliki serta pemanfaatannya secara optimal. Semua elemen sumber daya manusia di Kecamatan Pejawaran sudah bekerja secara optimal dalam mewujudkan Indikator Kinerja Nilai Sakip Kecamatan.

Sasaran 2 :

Meningkatnya Efektivitas dan transparansi Layanan Publik untuk Urusan Kewilayahan

Sasaran strategis Meningkatkan efektivitas dan transparansi layanan publik untuk urusan kewilayahan. didukung dengan indikator kinerja yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Nilai survey kepuasan masyarakat diukur dengan satu indikator kinerja yaitu nilai survey kepuasan masyarakat yang ditetapkan dengan prespektif pengguna layanan (*customer prespective*). Nilai survey kepuasan masyarakat atau indeks kepuasan masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat pengguna jasa dalam meperoleh pelayanan dari aparatur pemerintah. Capaian nilai survey kepuasan masyarakat tahun 2024 adalah sebesar 85,55 dari target yang ditetapkan sebesar 86,30 atau 99,13%.

Unsur pelayanan yang digunakan untuk pengukuran indeks kepuasan masyarakat meliputi prosedur, persyaratan, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan dan. penanganan pengaduan. Realisasi nilai survey kepuasan masyarakat dan perbandingan dengan target akhir Renstra sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.10

Capaian Indikator Kinerja Survey Kepuasan Masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik untuk Urusan Kewilayahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	86,30	85,55	99,13 %

Nilai survey kepuasan masyarakat sebesar 85,55 dilakukan pada 50 responden yang masuk dalam kategori mutu pelayanan baik. Hasil survey kepuasan masyarakat sesuai unsur pelayanan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.11
Hasil Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI	KINERJA	BOBOT	(3)*(5)
		UNSUR	UNSUR		
(1)	(2)	PELAYANAN	PELAYANAN	(5)	(6)
1	Persyaratan pelayanan	93	Baik	0.111	0,333
2	Prosedur Pelayanan	106	Baik	0.111	0.382
3	Waktu Pelayanan	96	Baik	0.111	0.351
4	Biaya / Tarif	115	Baik	0.111	0,422
5	Produk Spesifikasi Pelayanan	100	Baik	0.111	0,369
6	Kompetensi Pelayanan	101	Baik	0.111	0,364
7	Perilaku Pelaksana	100	Baik	0.111	0,364
8	Sarana dan Prasarana	111	Baik	0.111	0,409
9	Penangan Pengaduan, saran dan masukan	116	Baik	0.111	0,427
Nilai Indeks					3,422
NILAI IKM					85,556
Mutu pelayanan					B
Kinerja unit pelayanan					BAIK

1. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari Sasaran Strategis nomor 2, yaitu Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik untuk Urusan Kewilayahan dengan Indikator kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pejawaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Perbandingan capaian kinerja Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dapat diperbandingkan untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Indikator Nilai SKM
Tahun 2021 sampai Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi			
	2021	2022	2023	2024
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	83,67	84,00	85,70	85,55

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik untuk Urusan Kewilayahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	86,30	99,60%	98.82%	99,65%	99,13%

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra 2026	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik untuk Urusan Kewilayahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	98,67% (86,70)	99,13%	100,47%

Adapun analisis capaian kinerja dari indikator sasaran Kecamatan Pejawaran dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.14
Analisis Pencapaian Capaian Indikator Nilai SKM

Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	86	85,70	99,65	86.30	85,55	99,13
	Rata-Rata Capaian Kinerja				99,65			99,13

Dari table diatas, dapat diketahui bahwa untuk sasaran strategis Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik untuk Urusan Kewilayahan dengan indikator kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tidak mencapai target. Rata – rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2024 adalah 99,13 % dikategorikan Sangat baik. Capaian ini mengalami penurunan dari tahun 2023 yang mencapai 99,65%.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan komitmen reformasi pelayanan publik ke arah yang lebih baik, maka survey tentang opini publik dalam hal kepuasan masyarakat atas pelayanan di Kantor Kecamatan Pejawaran akan dipertahankan dan ditingkatkan secara berkesinambungan. Keberhasilan pencapaian indikator nilai suvey kepuasan masyarakat didukung dengan upaya pemberian pelayanan dengan Janji Pelayanan “**OPTIMIS**” yaitu:

- a. Optimal – Selalu berusaha memberikan informasi pelayanan dan pelayanan yang optimal serta maksimal;
- b. Teliti – Teliti dalam memproses dokumen berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- c. Ramah – Bersikap ramah dalam berkomunikasi dengan masyarakat;
- d. Ikhlas – Ikhlas tanpa mengharapkan apapun;
- e. Sopan – bersikap sopan santun dalam memberikan pelayanan.

Sehingga dengan perpegang pada janji pelayanan tersebut diharapkan dapat menjamin kualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Analisis atas Efisiensi Capaian Indikator Nilai SKM

Tabel 3.15
Analisis atas Efisiensi Capaian Indikator Nilai SKM

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik untuk Urusan Kewilayahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	99,13	96,78	2,35

Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis
Kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan dilakukan melalui 2 Program yaitu

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Menunjang /tidak menunjang
1	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik untuk Urusan Kewilayahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	99,13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana	100	Menunjang
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	Menunjang

2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan, Kecamatan Pejawaran telah menetapkan program yang merupakan bentuk instrument kebijakan yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

Anggaran di tahun 2024 untuk 2 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tersebut sangat tidak mencukupi. Untuk 2 program tersebut hanya memiliki anggaran total Rp. 2.058.849.411 dengan realisasi Rp. 1.992.656.739 atau 96,78 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat sisa anggaran yang tidak terpakai sebanyak Rp. 66.192.672

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan dengan indikator kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan didukung oleh pencapaian dengan perincian sebagai berikut:

Capaian kinerja sasaran 2 didukung oleh pencapaian sub kegiatan yang bersifat Rutin, dengan perincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki 5 Kegiatan, yaitu Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pada Tahun 2024, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki total anggaran Rp. 1.974.086.911 dan realisasi sebesar Rp. 1.907.894.239 atau sebesar 96,65 %. Adapun Kegiatan dan Sub kegiatan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Dengan anggaran Rp. 8.132.100,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.997.100,- atau 98,34% dengan sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Dengan anggaran Rp. 3.348.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.268.500,- atau 97,61 %. Sub kegiatan ini mempunyai realisasi anggaran yang cukup tinggi karena jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah, sudah mempunyai jadwal tetap dan tersusun. Kesulitan di sub kegiatan ini adalah permintaan dokumen perencanaan yang waktunya beriringan atau bersamaan. Sehingga diperlukan waktu ekstra untuk mengerjakan dokumen tersebut. Selain itu, kendala pengumpulan tiap kasi di tingkat Kecamatan Pejawaran yang tidak tepat waktu sehingga mengakibatkan pengolahan data dokumen perencanaan mengalami kendala.

Dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dengan anggaran Rp. 4.783.600,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.728.600,- atau 98,85 %. Sub kegiatan ini mempunyai realisasi anggaran yang cukup tinggi karena penyusunan semua laporan capaian kinerja sudah terjadwal dengan baik. Begitu juga dengan bahan laporan capaian kinerja yang sudah lengkap dan siap di bagian keuangan. Kendala yang ada, hanya sebatas mencari waktu yang tepat untuk mengadakan koordinasi laporan tersebut.

Dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Dengan anggaran Rp. 8.132.100,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.997.100,- atau 98,34% dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dengan anggaran Rp. 1.677.517.172,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.653.527.400,- atau 98,56 %. Sub kegiatan ini mempunyai realisasi anggaran yang cukup tinggi karena untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN sudah mempunyai jadwal yang tetap. Selain itu, juga sudah dihitung berdasarkan jumlah tahun sebelumnya sebagai acuan pengusulan di anggaran tahun 2024. Kesulitan dari sub kegiatan ini adalah adanya refokusing yang dihitung oleh BPPKAD sehingga menyebabkan berkurangnya anggaran. Terkadang terdapat juga item dari gaji yang kurang, sehingga diperlukan pergeseran anggaran yang cukup merepotkan. Faktor lainnya adalah penambahan pegawai yang tiba-tiba dan tidak berkoordinasi dengan bagian keuangan Kecamatan Pejawaran terlebih dahulu, sehingga terdapat kekurangan. Tetapi masih bisa diantisipasi dengan adanya pergeseran anggaran.

Dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN.

- Pelaksanaan Penatausahaan dana Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD

Dengan anggaran Rp. 21.660.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.260.000,- atau 88,91 %. Sub kegiatan ini mempunyai realisasi anggaran yang cukup tinggi karena untuk pembayaran honor verifikasi keuangan SKPD sudah terjadwal waktunya. Yaitu diatas tanggal 20 setiap bulannya. Adapun sisa anggaran di sub kegiatan ini adalah tidak terealisasinya anggaran untuk honor Pejabat Pengadaan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya koordinasi dengan pejabat pengadaan untuk jenis belanja yang menggunakan e katalog. Kecamatan Pejawaran mempunyai kesulitan untuk mengajukan dokumen belanja menggunakan e katalog. Format yang berbeda dan selalu berganti serta revisi yang berulang kali terjadi mengakibatkan kurangnya waktu pengajuan dokumen tersebut. Padahal seringkali kegiatan sudah harus dilakukan, sehingga memutuskan untuk tidak melanjutkan e katalog. Jauhnya jarak dengan pejabat pengadaan dan pengaturan waktu yang tidak tepat menjadi faktor utamanya.

Dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Dengan anggaran Rp. 3.648.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.599.600,- atau 98,67 %. Sub kegiatan ini mempunyai realisasi anggaran yang cukup tinggi karena penyusunan semua laporan keuangan, baik bulanan, triwulanan maupun semesteran sudah terjadwal dengan baik. Begitu juga dengan bahan laporan keuangan yang sudah lengkap dan siap di bagian keuangan. Kendala yang ada, hanya sebatas mencari waktu yang tepat untuk mengadakan koordinasi laporan tersebut.

Dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Dengan anggaran Rp. 103.713.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 100.118.600,- atau 96,53% dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Dengan anggaran Rp. 9.966.200,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.887.400,- atau 99,20 %. Sub kegiatan ini mempunyai realisasi anggaran yang cukup tinggi karena terbatasnya jumlah anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan ini. Padahal dalam satu kantor terdapat banyak sekali kebutuhan terutama untuk perabot, alat kebersihan, bahan pembersih dan alat

listrik. Tetapi karena terbatasnya anggaran yang ada, maka tidak semua kebutuhan dapat tercukupi.

Dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Dengan anggaran Rp. 93.747.600,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 90.231.200,- atau 96,24 %. Sub kegiatan ini mempunyai realisasi anggaran yang cukup tinggi karena seluruh jenis belanja didalamnya merupakan kebutuhan rutin sebuah organisasi. Penyediaan bahan logistik berisi diantaranya belanja gas, ATK, kertas cover, cetak kegiatan HUT RI, natura, makan minum rapat, honor PPTK dan Pembantu PPTK, Perjalanan Dinas dan BBM. Penyerapan anggaran sub kegiatan bahan logistik kantor tidak mengalami kendala yang berarti, hanya permasalahan ketidaksesuaian anggaran kas dengan kebutuhan di lapangan. Selain itu, dengan dana yang sangat terbatas harus memenuhi semua kebutuhan OPD dalam 1 tahun menjadi sangat sulit. Hal tersebut menyebabkan tidak semua kebutuhan dapat terdani. Harus dipilih untuk kebutuhan yang sangat penting dan mendesak saja.

Dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan.

- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Dengan anggaran Rp. 130.189.700,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 96.204.416,- atau 73.89% dengan sub kegiatan :

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Dengan anggaran Rp. 13.200.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.148.416,- atau 84,46 %. Sub kegiatan ini mempunyai realisasi anggaran yang cukup tinggi karena jumlah pembayaran listrik dan internet di Kecamatan Pejawaran sudah diperhitungkan sebelumnya. Karena merupakan pengeluaran rutin bulanan, jadi tidak ada kendala dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Terdapat sisa anggaran untuk listrik, dikarenakan jumlah tagihan tiap bulan berbeda sesuai dengan pemakaian.

Dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan.

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Dengan anggaran Rp. 116.989.700,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 85.056.000,- atau 72,70 %. Sub kegiatan ini mempunyai realisasi anggaran yang cukup rendah karena terdapat seorang PTT yang mutasi dari Kecamatan Pejawaran. Dari awal pengajuan anggaran

adalah 2 orang PTT, 2 Orang THL dan 1 Tenaga keamanan. Untuk penyerapan anggaran ini tidak mengalami kesulitan yang berarti karena adanya ketentuan pembayaran bagi tenaga non ASN ini. Hanya saja, kelebihan anggaran dari tenaga yang pindah tersebut, tidak dapat diubah ataupun digeser ke jenis belanja yang lain. Sehingga terdapat banyak sisa anggaran.

Dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Laporan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan.

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan anggaran Rp. 29.298.239,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.187.123,- atau 92,79% dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Dengan anggaran Rp. 13.200.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.148.416,- atau 84,46 %. Sub kegiatan ini mempunyai realisasi anggaran yang cukup tinggi karena jumlah pembayaran listrik dan internet di Kecamatan Pejawaran sudah diperhitungkan sebelumnya. Karena merupakan pengeluaran rutin bulanan, jadi tidak ada kendala dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Terdapat sisa anggaran untuk listrik, dikarenakan jumlah tagihan tiap bulan berbeda sesuai dengan pemakaian.

Dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan.

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Dengan anggaran Rp. 13.136.399,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.155.889,- atau 84,92 %. Sub kegiatan ini mempunyai realisasi anggaran yang cukup rendah karena ada beberapa pajak kendaraan yang belum dibayarkan. Dari 9 kendaraan dinas yang ada, hanya 5 kendaraan yang membayar pajak. Penyebab tidak terealisasinya pembayaran pajak dikarenakan pemilik kendaraan lupa membayar pajak dan juga ada beberapa kendaraan yang tidak mempunyai kelengkapan surat.

Dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.

- Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Dengan anggaran Rp. 9.162.240,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.103.734,- atau 99,36%. Sub kegiatan ini mempunyai realisasi anggaran yang cukup tinggi karena perencanaan terhadap rehabilitasi gedung sudah direncanakan. Jenis rehabilitasi yang

dilakukan diantaranya adalah perbaikan pintu pagar utama yang ada di Kecamatan Pejawaran. Setelah dilaksanakan perbaikan pintu pagar dilanjutkan dengan pengecatan pintu dan juga pengecatan baik untuk tembok maupun tralis yang ada. Selain itu juga ada perbaikan untuk tiang kanopi yang sudah bengkok. Tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan. Semua dapat terlaksana dengan lancar.

dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara.

- Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Dengan anggaran Rp. 6.999.600,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.927.500,- atau 98,96%. Sub kegiatan ini mempunyai realisasi anggaran yang cukup tinggi karena jumlah mesin yang ada melebihi jumlah perbaikan yang disediakan. Hal ini berkaitan dengan kemampuan anggaran yang ada di Kecamatan Pejawaran, sehingga tidak semua sarana dan prasarana yang rusak bisa diperbaiki.

dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik memiliki 1 Kegiatan, yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat. Pada Tahun 2024, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik memiliki total anggaran Rp. 84.762.500 dan realisasi sebesar Rp. 84.762.500 atau sebesar 100 %. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, penggunaan anggaran Program tersebut dinyatakan efisien.

Adapun Sub kegiatan dari Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan. Dengan anggaran Rp. 3.600.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.600.000,- atau 100%. Sub kegiatan ini mempunyai realisasi anggaran yang cukup tinggi karena didalamnya berisi honor untuk operator SIAK yang sudah direncanakan. Jadi tidak ada kendala yang berarti. Hanya saja terjadi perubahan operator SIAK pada semester 2, dikarenakan terdapatnya staff baru yang ditempatkan di bagian Pelayanan. Sehingga perlu dilakukan pengantian SK Camat untuk penunjukan Operator SIAK.

Dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintah terkait dengan Non Perijinan.

- Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan. Dengan anggaran Rp. 81.162.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 81.162.500,- atau 100%. Sub kegiatan ini mempunyai realisasi anggaran yang cukup tinggi karena merupakan kegiatan yang sudah terjadwal. Anggaran di sub kegiatan ini digunakan untuk kegiatan PBB di tingkat Kecamatan Pejawaran. Diantaranya adalah honor Tim Pelaksana tingkat Kecamatan dan Desa serta makan minum rapat. Untuk standarisasi honor sudah ada ketentuan tersendiri, sehingga berlaku sama untuk semua kecamatan sesuai dengan grade yang ada. Kesulitan yang ada yaitu, pelunasan PBB dari desa menumpuk di triwulan III dan IV di Tahun 2024 sehingga untuk honor desa tidak bisa terpenuhi dengan mekanisme Ganti Uang (GU). Karenanya ditambahkan mekanisme Belanja Langsung (LS) untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga pendistribusian honor PBB terutama untuk desa, tidak terlambat.
- Dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

REALISASI ANGGARAN BELANJA

Adapun rincian realisasi anggaran untuk mencapai indikator sasaran Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Kecamatan Pejawaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	1.974.086.911	1.907.894.239	96,64
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perencanaan Daerah</i>	8.132.100	7.997.100	98,34
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.348.500	3.268.500	97,61
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	4.783.600	4.728.600	98,85
<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1.702.825.172	1.676.387.000	98,45
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.677.517.172	1.653.527.400	98,57
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	21.660.000	19.260.000	88,92
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3.648.000	3.599.600	98,67
<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	103.713.800	100.118.600	96,53
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.966.200	9.887.400	99,21
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	93.747.600	90.231.200	96,25

<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	130.189.700	96.204.416	73,90
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	13.200.000	11.148.416	84,46
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	116.989.700	85.056.000	72,70
<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	29.226.139	27.187.123	93,02
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	13.136.399	11.155.889	84,92
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.162.240	9.103.734	99,36
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.927.500	6.927.500	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	84.762.500	84.762.500	100,00
<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat</i>	84.762.500	84.762.500	100,00
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	-	-	-
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	3.600.000	3.600.000	100,00
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	81.162.500	81.162.500	100,00
JUMLAH	2.058.849.411	1.992.656.739	96,78 %

3. ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI

Efektifitas pelaksanaan anggaran belanja Kecamatan Pejawaran pada tahun 2024 sudah cukup baik. Hal ini karena Realisasi anggaran belanja yang terserap adalah 96,78 %. Walau demikian Kecamatan Pejawaran untuk masa yang akan datang harus berupaya untuk meningkatkan realisasi anggaran belanja tersebut. Dengan demikian, optimalisasi Pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan baik oleh Kecamatan Pejawaran.

Efisiensi pelaksanaan anggaran belanja daerah pada Kecamatan Pejawaran tahun 2024 secara keseluruhan sudah dikelola dengan baik. Maka indikator sasaran Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan dikategorikan “**efisien**”, karena Prosentase Capaian Kinerja melebihi prosentase Capaian Anggaran.

Berikut kami sajikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja tahun 2024 .

Tabel 3.15
Perhitungan Efektivitas dan Efisiensi
Indikator Kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Perhitungan Efektivitas berdasarkan Capaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik untuk Urusan Kewilayahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Angka	86.30	85,55	99,13 %	Tidak Efektif	Keterangan : ≥100 : Efektif < 100 : Tidak Efektif

Perhitungan Efisiensi berdasarkan Capaian Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (Realisasi Kinerja / Target Kinerja) * 100%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran(%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik untuk Urusan Kewilayahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Angka	86.30	85,55	99,13 %	2.058.849.411	1.992.656.739	96,78 %	Effisien (Capaian Anggaran < Capaian Kinerja)

4. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA MANUASIA

Efisiensi merupakan ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Pencapaian sasaran Kecamatan Pejawaran didukung dengan aspek sumber daya yang dimiliki serta pemanfaatannya secara optimal.

Dilihat dari aspek efisiensi penggunaan sumber daya maka indikator kinerja ini dikategorikan “**efisien**”, karena capaian indikator lebih besar dari persentase penggunaan sumber daya manusia yaitu 100%. Penggunaan sumber daya yang secara optimal dilakukan oleh seluruh komponen di Kecamatan Pejawaran guna mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sumber daya yang dimaksud disini dapat berupa Sumber daya manusia dan juga sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Pejawaran.

Tabel 3.17
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia
Indikator Kinerja Survey Kepuasan Masyarakat

NO	Indikator Kinerja	Taget			Realisasi			Capaian (%)		
		Indikator	Dana	SDM	Indikator	Dana	SDM	Indikator	Dana	SDM
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	86.30	2.058.849.411	17	85,55	1.992.656.739	17	99,13 %	96,78 %	100

Efisiensi merupakan ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Pencapaian sasaran Kecamatan Pejawaran didukung dengan aspek sumber daya yang dimiliki serta pemanfaatannya secara optimal. Semua elemen sumber daya manusia di Kecamatan Pejawaran sudah bekerja secara optimal dalam mewujudkan Indikator Kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

B. REALISASI ANGGARAN

Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan Kecamatan Pejawaran cukup berhasil dalam mencapai sasaran. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Kecamatan Pejawaran pada tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 2.227.109.011 dan direalisasikan sebesar Rp 2.159.049.139 atau sebesar 96,95 %, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran Belanja
Kecamatan Pejawaran Tahun Anggaran 2024

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	1.974.086.911	1.907.894.239	96,64
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perencanaan Daerah</i>	8.132.100	7.997.100	98,34
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.348.500	3.268.500	97,61
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	4.783.600	4.728.600	98,85
Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1.702.825.172	1.676.387.000	98,45
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.677.517.172	1.653.527.400	98,57
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	21.660.000	19.260.000	88,92
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3.648.000	3.599.600	98,67
<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	103.713.800	100.118.600	96,53
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.966.200	9.887.400	99,21
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	93.747.600	90.231.200	96,25
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	130.189.700	96.204.416	73,90
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	13.200.000	11.148.416	84,46
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	116.989.700	85.056.000	72,70

<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	29.226.139	27.187.123	93,02
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	13.136.399	11.155.889	84,92
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.162.240	9.103.734	99,36
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.927.500	6.927.500	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	84.762.500	84.762.500	100,00
<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat</i>	84.762.500	84.762.500	100,00
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	-	-	-
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	3.600.000	3.600.000	100,00
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	81.162.500	81.162.500	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	13.500.000	13.500.000	100,00
<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	13.500.000	13.500.000	100,00
Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di wilayah kecamatan	13.500.000	13.500.000	100,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	154.687.500	152.892.400	98,84
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	937.500	937.500	100,00
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-	-
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	150.000.000	148.579.900	99,05
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	937.500	937.500	100,00
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	937.500	937.500	100,00
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1.875.000	1.500.000	80,00

Dilihat dari realisasi anggaran, untuk Belanja Langsung penyerapan anggaran Tahun 2024 mencapai 96,95%, atau dari anggaran sebesar Rp. 2.227.109.011,- terealisasi sebesar Rp. 2.159.049.139,- terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.67.987.772,-

Efisiensi dari penggunaan pagu anggaran pada terlihat pada sub kegiatan sebagaimana berikut ini:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Rp. 80.000,-
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Rp. 55.000,-
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 23.989.772,-
4. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Rp. 2.400.000,-
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Rp. 48.400,-
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 78.800,-
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp. 3.516.400,-
8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 2.051.584,-
9. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 31.933.700,-
10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp. 1.980.510,-
11. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Rp. 58.506
12. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Rp. 1.420.100,-
13. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Rp. 375.000,-

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pejawaran telah disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP Kecamatan Pejawaran dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pejawaran yang telah dicapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah dibuat. Dari hasil kinerja tersebut dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi selanjutnya.

A. KESIMPULAN

Capaian Kinerja dari 2 (Dua) Sasaran Strategis Kecamatan Pejawaran tahun 2024 rata-rata sebesar 100,035% dengan masing-masing capaian sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan dengan Indikator Kinerja nilai SAKIP Kecamatan. Target kinerja tahun 2024 dengan penilaian pada dokumen perencanaan tahun 2024 diharapkan memperoleh nilai B (69) dan dari hasil evaluasi dokumen SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banjarnegara, Nilai SAKIP Kecamatan Pejawaran adalah B (69,65) sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100,94 %.
2. Sasaran Strategis Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik untuk urusan kewilayahan dengan Indikator Kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), pada tahun 2024 ditargetkan mendapatkan skor atau nilai 86,30. Hasil dari nilai survey kepuasan masyarakat pada tahun 2024 diperoleh nilai 85,55 sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 99,13%

Melihat capaian kinerja pada masing-masing indikator tersebut maka dapat diambil rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar **100,035%**

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan sasaran dan kegiatan yang belum secara optimal tercapai, maka untuk masa yang akan datang perlu ditempuh langkah-langkah yang konkrit untuk peningkatan kinerja, Rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan serta membuat aplikasi linktree untuk Pengumpulan Data Kinerja yang terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik dalam rangka meningkatkan nilai SAKIP.
2. Optimalisasi pelayanan melalui pemberian penjelasan mengenai syarat perijinan dan non perijinan serta pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat seperti papan Informasi, Pamflet dan Sosialisasi Pelayanan;
3. Optimalisasi waktu pelayanan dengan menambah jumlah personal yang menunjang pelayanan.
4. Optimalisasi penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan. Seperti kursi roda dan pegangan tangan untuk disabilitas.
5. Optimalisasi pendampingan terhadap Aparatur Pemerintah Desa dalam rangka peningkatan kualitas administrasi pemerintahan desa.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pejawaran Tahun 2024. Laporan ini masih jauh dari yang diharapkan, namun setidaknya dapat dijadikan gambaran mengenai kinerja Kecamatan Pejawaran di Tahun 2024. Akhirnya kami berharap LKjIP ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan	Nilai SAKIP Kecamatan	B (69)	B (69,65)	100,94%
Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik untuk urusan kewilayahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	86,30	85,55	99,13%

PENGHARGAAN YANG DITERIMA
TAHUN 2024



